

## REKONSTRUKSI PARADIGMA POLITIK DI KALANGAN PEMUDA GEREJA DALAM BINGKAI ETIKA

Clive kotta<sup>1</sup> Nontje Timbuleng<sup>2</sup> <sup>3</sup>Mieke Sendow

<sup>1</sup>Fakultas Teologi, Universitas Kristen Indonesia Tomohon

<sup>2</sup>Fakultas Teologi, Universitas Kristen Indonesia Tomohon

<sup>3</sup>Fakultas Teologi, Universitas Kristen Indonesia Tomohon

Email: <sup>1</sup>[clivecristian18@gmail.com](mailto:clivecristian18@gmail.com) , <sup>2</sup>[timbulengnontjemery@gmail.com](mailto:timbulengnontjemery@gmail.com) , <sup>3</sup>[sendowmn@gmail.com](mailto:sendowmn@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to examine, from an ethical-theological perspective, the practice of vote-buying (money politics) among youth in the GMIM Tasik Wangurer Congregation, Bitung 8 Region, particularly in the context of general elections. Vote-buying, which has become a habit and even a tradition in local society, significantly influences the political choices of young voters. Many youths tend to choose candidates based on material rewards rather than integrity or political vision. This qualitative research employs a descriptive approach through observation, interviews, and literature study. The findings indicate that money politics undermines democratic values and Christian ethics within the church community, causes internal conflicts, and weakens the moral awareness of youth. From a theological-ethical standpoint, such practices contradict the values of honesty, justice, and moral responsibility as citizens of both the Kingdom of God and the state. This study recommends a proactive role from the church and congregational leaders in fostering ethical awareness among youth to reject money politics and vote responsibly, thereby supporting fair and honest elections*

**Key Words:** *lections, Politics, Youth, Ethics*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara etis-teologis praktik politik yang terjadi di kalangan pemuda dalam Jemaat GMIM Tasik Wangurer Wilayah Bitung 8, khususnya dalam konteks pemilihan umum. Fenomena politik yang telah menjadi kebiasaan bahkan dianggap tradisi dalam masyarakat, turut memengaruhi perilaku pemilih muda. Banyak pemuda cenderung memilih calon pemimpin berdasarkan imbalan materi, bukan karena integritas atau visi misi calon tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik politik telah merusak nilai-nilai demokrasi dan etika Kristen dalam kehidupan berjemaat, menyebabkan konflik internal, serta melemahkan kesadaran moral pemuda. Dari perspektif etika teologis, tindakan ini bertentangan dengan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral sebagai warga Kerajaan Allah dan negara.

**Kata Kunci:** *Pemilu, Politik, Pemuda, etika*

## PENDAHULUAN

Politik berasal dari bahasa Yunani adalah polis yang artinya negara-kota. Dalam negara kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya.<sup>4</sup> Manakala manusia mencoba untuk untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, mereka berusaha meraih kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau berupaya mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, maka mereka sibuk dengan suatu kegiatan yang dapat di namai sebagai Politik. Dalam ranah pemerintahan politik sejatinya adalah penerapakan kendali di dalam masyarakat lewat pemberdayaan keputusan kolektif. Sebagai produk hubungan publik, politik memberikan kekuasaan sebagai bagian dari kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain guna menuruti kehendaknya. Politik juga dapat dipahami sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.<sup>5</sup> Politik menduduki tempat yang paling penting karena bagian yang terkandung dari pemahaman isi dan landasan filsafatnya mempunyai tujuan politik yang memberikan nilai positif. Namun politik bukanlah tujuan dalam dirinya, tetapi sebagai sarana untuk memperoleh tujuan terakhir bagi manusia yaitu kebahagiaan.<sup>6</sup> Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia menerapkan sistem pemilu langsung untuk memilih pemimpin di tingkat nasional dan daerah. Demokrasi Indonesia ditopang juga dengan prinsip multipartai yang menciptakan begitu banyak partai politik untuk bersaing maupun saling menopang satu dengan yang lain. Politik merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena dapat menentukan arah kebijakan dan tata kelola yang mempengaruhi kehidupan bersama. Melalui politik kita dapat memahami dinamika kekuasaan, serta peran nilai-nilai demokrasi dalam menciptakan tatanan yang adil dan sejahtera. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi. Demokrasi berarti "pemerintahan rakyat" atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi didalam suatu negara. Hak untuk ikut serta dalam pemulihan umum merupakan hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat.<sup>7</sup> Maka dalam penelitian ini saya memfokuskan kepada anggota pemuda yang ada di jemaat GMIM Tasik Wangurer, yang merupakan warga negara yang telah memiliki hak untuk memilih.

Sudah sejak lama politik ini telah menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan kita, terutama dalam menentukan pemimpin. Politik mencakup berbagai aktivitas seperti pemerintahan, pemilu, kebijakan politik, hingga advokasi kepentingan masyarakat. Pada dasarnya politik jika dijalankan dengan sehat akan mendatangkan keuntungan bagi kesejahteraan bersama, tetapi sebaliknya juga merusak ideology Negara jika politik dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan. Terdapat berbagai macam keleluasan pelaksanaan dari politik yang umum terjadi di Indonesia seperti korupsi, persaingan yang tidak sehat dalam pemilu (pemilihan umum), penggelapan dana, mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum, dan lain sebagainya.

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud pada proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik juga sering dikaitkan dengan hal penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Yang menyelenggarakannya bukan rakyat, tetapi pemerintahan yang berkuasa. Hanya saja partisipasi rakyat sangat diharapkan. Tujuannya agar kerja pemerintahan dapat terlaksana dengan baik. Percuma suatu pemerintahan menyelenggarakan Negara

<sup>4</sup> K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 153.

<sup>5</sup> Adolf Bastian Simamora, "'POLITIK MENURUT ALKITAB DAN IMPLIKASINYA BAGI PERAN GEREJA DALAM PUSARAN POLITIK DI INDONESIA,' Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama," 1, 1 (2019): 23.

<sup>6</sup> Edi Sumanto, "'PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK (Studi Komperatif Al-Farabi Dengan Thomas Aquinas),' EL-AFKAR Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis," 2, 1 (2017): 55.

<sup>7</sup> Rina Meutia Iryana, *Mengenal sistem Pemerintahan di Indonesia yuk* (Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2018), 5.

tanpa dukungan dari rakyat.<sup>8</sup> Sehingga tujuan dari berpolitik adalah kebahagiaan. Sejatinya politik Kristen dipahami dengan maknanya yang luas, maka ia adalah horison kehadiran Kekristenan di mana peran dirinya dapat mendorong transformasi seluruh kehidupan. Politik dalam arti yang luas tidak hanya sekadar perebutan kekuasaan (power), tetapi juga penegasan arah etis demi pemberdayaan (empower) kehidupan bersama.<sup>9</sup>

Praktik politik yang dikenal di Indonesia pada proses pemilihan umum sehingga istilah tersebut sering disebut sebagai proses pertukaran uang dengan suara atau suatu tindakan jual beli suara untuk mempengaruhi suara pemilih. Di kota Bitung yang adalah tempat tinggal saya, maraknya terjadi praktek politik, bahkan hal ini sudah menjadi kebiasaan atau dapat dikatakan sebagai tradisi yang tercipta dalam lingkungan masyarakat setiap diadakan pemilihan umum. Kebiasaan berpolitik oleh warga masyarakat kota Bitung dan sekitarnya lazim disebut dengan praktik politik. Mengutip dari laman internet, arti dari politik sendiri dapat diartikan sebagai pemberian uang, barang, jasa atau materi lainnya yang dapat dikonversi dengan nilai uang di tahun politik atau saat kampanye menjelang Pemilu.<sup>10</sup>

Politik pada masa sekarang ini sudah menjadi hal yang lumrah dikenal setiap orang, bahkan sampai ruang lingkup berjemaat sudah mengenal dan melakukan praktik politik tersebut. Salah satunya jemaat GMIM Tasik Wangurer Wilayah Bitung 8 dipengaruhi oleh praktik politik. Setiap anggota jemaat pasti mengenal apa itu politik bahkan sudah sulit untuk ditinggalkan dalam kebiasaan menjelang Pemilu. Hampir seluruh anggota jemaat yang telah memiliki hak pilih terbiasa memilih calon pemimpin yang mengimingi uang atau bantuan lainnya berupa sembako. Jika calon tersebut tidak memberikan uang maka calon pemimpin tersebut tidak akan dipilih oleh anggota jemaat yang terlibat. Tidak jarang akan timbul pemikiran dari mereka bahwa, untuk apa memilih pemimpin yang tidak membagikan uang, sedangkan setelah dipilih calon pemimpin itu akan lupa dengan janji visi misi mereka, maka hal inilah menjadi salah satu pendorong anggota jemaat memilih pemimpin berdasarkan lancarnya politik yang dilakukan.

Tidak hanya para orang tua, anak-anak mereka yang juga sudah memiliki hak pilih bahkan memiliki pemikiran serupa dengan orangtua mereka. Para anggota pemuda yang ada di jemaat GMIM Tasik Wangurer juga ada yang memiliki kebiasaan serupa. Dampak yang sering terjadi karena hal ini selain rusaknya kualitas pemilu yang jujur, juga terjadi perselisihan antar jemaat yang berbeda pilihan. Selain merusak persekutuan dan persaudaraan dalam jemaat, politik juga berdampak buruk terhadap kondisi di luar jemaat. Paling umum suami dengan istri punya kandidat masing-masing, demikian pula dengan anak-anak yang sudah punya hak memilih bisa terjadi jarak antara sesama karena perbedaan pendapat. Para pemuda yang juga terlibat dalam pembagian uang politik atau dikenal sebagai para tim sukses (timses), tanpa disadari bahwa mereka telah mengarah pada perjalanan menuju pelanggaran, melanggar aturan hukum karena sudah termasuk dalam perbuatan suap menyuap.

KPK atau dikenal dengan komisi pemberantasan korupsi mengistilahkan politik sebagai praktik suap-menyuap. Undang-undang tentang politik diatur dalam pasal 515 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu yang penegasannya bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan uang kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak suaranya ataupun juga memilih calon tertentu, akan dikenakan hukuman selama 4 tahun penjara.<sup>11</sup> Karena bentuk penawaran yang juga menggiurkan bagi para pemuda, apalagi dengan nominal uang yang lumayan maka mereka sudah terbiasa mengharapkan uang tersebut sebelum melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dalam pesta

<sup>8</sup> Asmoro Ahmadi, *Filsafat Umum* (Jakarta: rajawali pers, 2021), 1.

<sup>9</sup> Sinaga, "Umat Kristiani Dan Politik Praktis Di Indonesia: Dari Politik Minoritas Ke Politik Pluralisme.," 1, 1 (2019): 129.

<sup>10</sup> "<https://aclc.kpk.go.id/hajarseranganfajar>, Hajar Serangan Fajar, diakses tanggal 8 Desember," 2014.

<sup>11</sup> KPU, *Undang-Undang Pemilu* (Jakarta: KPU, 2017), 56.

demokrasi. Ada juga ucapan-ucapan yang biasa didengar bahwa jika tidak ada politik maka mereka tidak akan menggunakan hak pilih mereka, dengan kata lain mereka akan Golput (Golongan Putih).

Anggota Jemaat dari jemaat GMIM Tasik Wangurer Wilayah Bitung 8 juga sering menjadikan bahan candaan mengenai jumlah uang suap yang akan diterima dari calon yang didukung masing-masing, sehingga tidak jarang terjadi perbedaan dan konflik, atau terdapat juga kecurigaan yang timbul karena masalah seperti tindakan korupsi dalam praktik suap/politik dimana ketika para tim sukses membagikan uang di beberapa tempat menerima nominal uang yang berbeda padahal berasal dari paslon (pasangan calon) yang sama, sehingga ada kecurigaan diantara masyarakat. Politik tidak hanya mencederai prinsip keadilan dalam pemilu, tetapi juga dapat melemahkan kualitas kepemimpinan yang dihasilkan, karena lebih mengutamakan kekuatan dari finansial mereka dari pada program-program atau visi dan misi mereka. Walaupun sudah begitu banyak upaya yang dilakukan oleh badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan pendidikan politik bagi masyarakat, yang bertujuan untuk menghentikan praktik politik tersebut tetapi masih saja praktik uang masih berlangsung sampai saat ini. Dalam dunia politik yang semakin kompleks dan pragmatis, muncul kebutuhan mendesak untuk membangun sebuah etika politik yang berlandaskan iman dan keadilan. Yonatan Alex Arifianto, seorang akademisi dan teolog Kristen, menawarkan kerangka etis yang kuat berdasarkan nilai-nilai agama Kristen, seperti kasih, integritas, keadilan sosial, dan tanggung jawab publik. Pandangan ini sangat relevan untuk Pemuda GMIM (Gereja Masehi Injili di Minahasa), yang hidup dan bertumbuh di tengah dinamika sosial-politik lokal dan nasional.

Dasar Teologis dan Pemikiran Arifianto tentang Etika Politik Politik sebagai Sarana Mewujudkan Keadilan Allah Menurut Arifianto, politik bukan hanya soal kekuasaan, tetapi sarana untuk melayani, menyuarakan keadilan, dan membangun masyarakat yang sejahtera secara etis dan spiritual. Menolak Politik Transaksional Arifianto secara tegas menolak praktik politik dan transaksional. Baginya, ini adalah bentuk penyimpangan moral yang mencederai nilai demokrasi dan merusak martabat manusia. Pendidikan Politik dan Spiritualitas Ia mendorong gereja dan pemimpin Kristen untuk aktif mendidik jemaat termasuk pemuda agar memahami politik secara benar, dengan menghidupi nilai-nilai Kristen dalam kehidupan berbangsa. Moderasi Beragama dan Toleransi Sosial Arifianto menyoroti pentingnya mengembangkan politik yang inklusif dan moderat, untuk menjaga persatuan dan perdamaian dalam masyarakat yang majemuk. Etika politik menurut Yonatan Alex Arifianto bukanlah sekadar teori, tetapi panggilan praktis bagi Pemuda GMIM untuk berani tampil sebagai pembaru dalam dunia politik yang penuh tantangan. Melalui nilai-nilai iman Kristen, Pemuda GMIM dapat menjadi agen transformasi moral dan sosial yang berdampak luas baik di gereja, masyarakat, maupun bangsa.

Dalam artikelnya yang berjudul Pendidikan Kristiani Mereduksi Hegemoni Politik Identitas: Upaya Membangun Demokrasi dan Kebebasan Berpolitik, Arifianto menekankan pentingnya pendidikan Kristen dalam membentuk paradigma politik yang berintegritas di kalangan generasi muda. Ia mengkritisi fenomena politik identitas yang dapat menyebabkan segregasi sosial dan konflik, serta menyoroti peran gereja dalam membangun demokrasi dan kebebasan berpolitik melalui pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Kristen. Dalam penelitian ini menawarkan kebaruan dalam perspektif Arifianto bahwa pentingnya etika politik dalam aktualisasi kebijakan publik. Ia mengusulkan agar nilai-nilai agama, khususnya dalam konteks Kekristenan, menjadi landasan dalam membangun etika politik yang pro terhadap masyarakat luas dan kemanusiaan. Hal ini relevan dalam konteks pemuda, sebagai generasi yang akan terlibat aktif dalam politik, untuk memiliki pandangan yang etis dan berlandaskan pada nilai-nilai agama. Dalam penelitian ini Peran pelsus dan pemuda dalam Mewujudkan Pendidikan Politik bagi Warga Gereja, Arifianto menyoroti pentingnya peran gereja dalam memberikan pendidikan politik kepada jemaatnya. Ia berpendapat bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk membekali anggotanya, termasuk pemuda, dengan pemahaman politik yang benar, agar mereka dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara bertanggung jawab.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dalam konteks alaminya.<sup>12</sup> Pendekatan ini menekankan pada makna, pengalaman, serta perspektif subjek penelitian melalui teknik seperti observasi dan wawancara mendalam. Tidak seperti pendekatan kuantitatif yang berbasis angka, pendekatan kualitatif lebih menekankan deskripsi kontekstual dan naratif.<sup>13</sup> Peneliti menjadi instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Fleksibilitas metode ini memungkinkan penyesuaian teknik sesuai dinamika di lapangan. Pendekatan ini sangat sesuai untuk menggali realitas sosial yang kompleks, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna yang terkandung di balik tindakan manusia dalam konteks tertentu. penelitian ini juga akan mengulas bagaimana pendekatan Rekonstruksi paradigma politik di kalangan pemuda gereja dalam bingkai etika.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **ETIKA POLITIK MENURUT YONATAN ALEX ARIFIANTO**

Yonatan Alex Arifianto adalah seorang teolog dan akademisi yang aktif mengkaji dan menulis tentang etika politik dari perspektif iman Kristen. Melalui berbagai publikasinya, ia menekankan pentingnya nilai-nilai agama dalam membentuk etika politik yang berkeadilan, inklusif, dan bertanggung jawab. Etika politik menurut Yonatan Alex Arifianto merupakan cabang dari disiplin ilmu etika yang berkaitan dengan tingkah laku maupun sebuah tindakan dan prinsip-prinsip moral yang terkait dengan dunia perpolitikan dan kekuasaan. Dan etika politik ini sangat berperan dalam pertimbangan moral dan integritas yang mendasarisebuah tindakan dan juga adanya keputusan yang diambil oleh para pemimpin politik, untuk dilaksanakan dalam masyarakat umum. Maka tentu hal itu memerlukan prinsip moralitas dan juga dedikasi serta tanggung jawab menjaga untuk tetap berdedikasi dan menjaga amanah dalam tanggung jawab publik. Etika politik juga terkait adanya pertanggungjawaban yang real, transparansi yang baik dalam menjalankan agenda politik dalam kehidupan sehari-hari tetap menjunjung kemanusiaan maka peran penting politisi sebagai teladan dalam perbuatan baik yang mengutamakan rakyat, maupun dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan kekuasaan demi kepentingan bersama. Dengan menekankan begitu pentingnya nilai hak asasi manusia dan menghormati kemanusiaan serta segala hal dalam diri manusia yang sangat perlu dijunjung tinggi. Sehingga etika politik dalam kehidupan politisi tersebut harus memastikan kebijakan-kebijakan politik dalam ruang publik tersebut tidak merugikan kelompok tertentu maupun secara luas kepada masyarakat, bahkan kebijakan publik tersebut dilarang keras melanggar prinsip-prinsip etis. Sebab sejatinya etika politik adalah landasan penting untuk membangun masyarakat yang adil, damai aman dan membangun kemajuan peradaban manusia Memprioritaskan Nilai-Nilai Agama dalam Kebijakan Publik Dalam artikel berjudul Memprioritaskan Nilai-Nilai Agama: Membangun Etika Politik dalam Aktualisasi Kebijakan Publik, Arifianto bersama Andreas Joswanto dan Simon Simon menekankan bahwa politik yang digunakan untuk kemanusiaan adalah mulia. Namun, praktik politik yang berfokus pada agenda pribadi dapat merugikan masyarakat. Mereka mengusulkan agar nilai-nilai agama, seperti kasih, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama, menjadi dasar dalam merancang kebijakan publik yang pro-rakyat dan berorientasi pada kemanusiaan. Etika Kristen dalam Dinamika Politik Praktis<sup>14</sup>

Dalam Etika Kristen di tengah Dinamika Politik Praktis, Arifianto bersama Fereddy Siagian membahas pentingnya revitalisasi nilai-nilai agama dalam praktik politik kontemporer. Mereka berpendapat bahwa gereja harus mampu membangun spiritualitas politik yang berlandaskan pada nilai-nilai Alkitabiah,

<sup>12</sup> Imam Gunawan, *metode penelitian kualitatif, Teori dan Praktik* (Jakarta: umi Aksara, 2013), 89.

<sup>13</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Yudhistira, 1985), 67.

<sup>14</sup> Arifianto Joswanto, "Memprioritaskan Nilai-Nilai Agama: Membangun Etika Politik dalam Aktualisasi Kebijakan Publik." LOGIA: Jurnal Teologi Pentakosta," 2023, 77.

sehingga dapat memberikan teladan dan menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Peran Gembala Sidang dalam Pendidikan Politik Gereja Dalam Peran Gembala Sidang dalam Mewujudkan Pendidikan Politik bagi Warga Gereja, Arifianto menekankan bahwa gereja harus berperan aktif dalam memberikan pendidikan politik kepada jemaatnya. Hal ini penting agar warga gereja memiliki pemahaman yang baik tentang politik dan dapat berpartisipasi secara etis dalam kehidupan bernegara. Moderasi Beragama dan Toleransi Sosial Dalam Politik Identitas dan Moderasi Beragama: Implikasi Teologis dalam Membangun Toleransi Sosial di Era Disrupsi, Arifianto bersama Reni Triposa membahas bagaimana politik identitas dapat memperburuk ketegangan sosial. Mereka mengusulkan moderasi beragama sebagai solusi untuk meredakan polarisasi dan membangun toleransi sosial, dengan dasar prinsip-prinsip teologis yang mendukung perdamaian dan saling pengertian. <sup>15</sup>Peran Etis Teologis Kristen dalam Isu HAM dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Gembala Sidang sebagai Pembela Kemanusiaan: Peran Etis Teologis Kristen dalam Menanggapi Isu HAM dan Tanggung Jawab Sosial, Arifianto bersama Elisa Nimbo Sumual dan Yohana Fajar Rahayu membahas bagaimana gereja harus berperan dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Mereka menekankan bahwa ajaran Kristen harus diterjemahkan dalam tindakan konkret untuk mendukung kemanusiaan dan keadilan sosial. <sup>16</sup>

Dasar-dasar etika teologis yang dideskripsikan harusnya dapat menjadi panduan bagi gereja dan kekristenan dalam menghadapi perdebatan politik di era digital dan globalisasi ini. Sebab hal itu mencakup prinsip-prinsip moral yang relevan, seperti kasih, perdamaian, keadilan, dan rasa hormat terhadap manusia sebagai citra Tuhan. Di mana ada perdebatan politik, etika teologis membawa aspek-aspek merendahkan manusia ke dalam pembahasan tentang tindakan-tindakan agenda politik. Keterkaitan etis teologi dan perdebatan politik harus menekankan pentingnya kebijakan yang menghormati prinsip-prinsip ini dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan hak asasi kemanusiaan. Maka dalam perdebatan politik, etika teologis dapat digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan politik atau kebijakan melindungi hak-hak asasi manusia atau malah melanggarnya. Ini yang menjadi peran dari kekristenan supaya para politisi diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip moral, dan nalar yang sesuai prinsip kemanusiaan yang dianut oleh kekristenan. Sehingga para politisi diharapkan untuk menghindari retorika yang merendahkan atau menghasut kebencian terhadap SARA. Maka sejatinya kekristenan wajib menghindari kebohongan atau manipulasi dalam upaya agenda politik hanya demi jabatan kekuasaan yang sementara. Dalam kajian Alkitab perdebatan politik yang dapat mengasah program kerja bagi kepentingan masyarakat harusnya dilakukan dengan cara lemah lembut dan dengan rasa hormat. Sebab setiap tindakan dan perkataan yang dilakukan dalam kekristenan diminta pertanggungjawaban (1 Pet 3:15). Hal ini menyangkut hati yang murni dengan tujuan memperlakukan Kristus disetiap lini kehidupan. Tidak dipungkiri bahwa dalam perdebatan politik, kekristenan harus menghindari persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekocokan dan pertengkaran yang tidak berguna dan sia-sia belaka (Tit 3:9). Harus menghindari untuk mencari-cari soal dan membesarkan masalah dengan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cidera, fitnah, curiga, percekocokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran (2 Tim 6:4-5), bahkan Rasul Paulus menegaskan untuk mengingat supaya umat Tuhan jangan bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya (2 Tim 2:14). Perdebatan yang membawa pada tindakan kebencian harus dihindari oleh umat Tuhan. Sebab Tuhan juga menginginkan untuk menghormati orang lain. Seperti yang dinyatakan dalam Matius 7:12, dinyatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka; karena inilah yang ditekankan dalam hukum Taurat dan kitab para nabi.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Arifianto Yonatan Alex, "Media Sosial dan Perdebatan Politik: Upaya Gereja Mereduksi Konflik Pemilu di Era Digital dalam Bingkai Etis Teologis." *EULOGIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 2023, 89.

<sup>16</sup> Arifianto Yonatan Alex, "Etika Kristen di tengah Dinamika Politik Praktis: Merevitalisasi Nilai-Nilai Agama dalam Praktik Politik Kontemporer." *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen*, 2023, 41-43.

<sup>17</sup> Yohanis Udju Rohi, "Misi Gereja Melalui Dunia Politik," *Missio Ecclesiae* 6, no. 1, 1, 6 (2017): 32.

**Pandangan Pemuda Mengenai Politik Praktis Pemuda.**

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para pemuda di jemaat GMIM Tasik wangurer, semua pemuda yang telah penulis ajukan pertanyaan yang bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi pemuda atau responden terhadap kegiatan pemilihan, baik itu pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah, maupun pemilu presiden. Mayoritas atau seluruh responden memberikan pernyataan yang sangat baik mereka menyatakan: Ya, kami selalu mengikuti kegiatan pemilihan. Jawaban tersebut menunjukkan bahwa pemuda memiliki komitmen tinggi terhadap proses demokrasi. Hal ini menandakan bahwa para pemuda memiliki kesadaran politik yang baik sehingga pada usia mereka yang telah memiliki hak pilih, mereka menggunakan hak mereka dengan baik dalam mengikuti kegiatan pemilihan. Partisipasi yang konsisten dalam pemilihan umum menandakan bahwa pemuda peduli terhadap siapa yang mewakili mereka serta bagaimana pemerintahan dijalankan.

Dari antusiasnya para pemuda dalam mengikuti kegiatan pemilihan menunjukkan bahwa ini bisa dimanfaatkan untuk memperdalam pendidikan politik, misalnya melalui sosialisasi program calon atau mekanisme pemilihan agar para pemuda memiliki integritas yang mereka pegang dalam mengikuti kegiatan pemilihan, sehingga para pemuda yang mengerti dan paham mengenai demokrasi di Indonesia ini seperti apa dan mereka tidak akan salah dalam menggunakan hak pilih mereka. Dalam usia pemuda tentunya mereka sudah memiliki cukup banyak pengetahuan tentang hal-hal dalam kehidupan mereka sehari-hari bahkan dalam politik sekalipun walaupun tidak mengetahuinya secara mendalam tetapi hal-hal dasar tentang politik itu sudah mereka ketahui, berdasarkan hasil wawancara kepada para pemuda untuk melihat pemahaman mereka mengenai politik. Ada begitu banyak hal yang ditemukan berdasarkan pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh para informan sehubungan dengan politik. Politik merupakan salah satu praktik yang merusak integritas pemilihan umum.

Berdasarkan sudut pandang dari para pemuda, menurut pemahaman mereka politik merupakan praktik membagikan uang menjelang pemilihan umum yang bertujuan untuk mendapatkan suara. Ada juga yang memberi pemahaman bahwa politik adalah pemberian atau janji untuk menyuap seseorang agar tidak menggunakan hak pilih mereka atau mengarahkan mereka untuk memilih calon yang memberikan mereka uang atau janji tersebut. Tindakan ini tentunya bertentangan dengan hukum mengenai pemilihan umum itu sendiri, tindakan ini juga di sebut sebagai manipulatif yang mana mereka lakukan untuk mempengaruhi pilihan para pemuda. Sebagian besar informan menunjukkan kesadaran bahwa politik adalah praktik yang telah merusak sistem demokrasi dan telah menciptakan ketergantungan finansial dalam proses pemilihan umum, politik dapat menjadi budaya yang merusak demokrasi jangka panjang. Para pemuda juga menunjukkan keprihatinan mereka terhadap kerugian jangka panjang, baik dari segi etika maupun keadilan politik.

Dalam pengamatan di lapangan yang telah penulis lihat dan melakukan penelitian kepada para pemuda sebagai informan mengenai praktik politik yang terjadi di lingkungan kehidupan para pemuda dan masyarakat ada begitu banyak bentuk-bentuk dari praktik politik tersebut. Para informan mengatakan bahwa Berdasarkan hasil wawancara terhadap 19 informan, ditemukan bahwa praktik politik masih menjadi fenomena yang umum terjadi dalam proses pemilihan. Sebanyak 14 dari 19 informan (sekitar 74%) menyatakan bahwa politik terjadi dalam bentuk pembagian uang tunai langsung, khususnya menjelang hari pemungutan suara yang dikenal sebagai serangan fajar. Bentuk ini merupakan metode klasik yang kerap digunakan oleh calon pemimpin atau tim sukses untuk memengaruhi pilihan pemilih secara langsung. Sebanyak 5 informan (sekitar 26%) memberikan perspektif bahwa politik tidak hanya berbentuk pemberian uang tunai, tetapi juga dapat berupa janji-janji politik (misalnya janji pekerjaan, proyek, atau jabatan) serta pembagian sembako. Hal ini menunjukkan bahwa politik mengalami perubahan-perubahan bentuk sesuai dengan konteks sosial-ekonomi masyarakat. Pada masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, bantuan sembako menjadi daya tarik tersendiri yang dapat dimanfaatkan oleh

calon untuk meraih dukungan.

Seluruh informan sepakat bahwa bentuk dan intensitas politik sangat bergantung pada konteks sosial dan lokasi daerah. Di daerah dengan tingkat pendidikan dan kesadaran politik yang rendah, praktik politik cenderung lebih mudah diterima dan dianggap sebagai hal yang “lumrah” dalam pemilu. Ini mencerminkan adanya persoalan struktural dalam sistem demokrasi yang masih lemah dari sisi etika politik. praktik politik mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam proses demokrasi yang seharusnya mengedepankan nilai keadilan, transparansi, dan integritas. Politik tidak hanya mencederai demokrasi, tetapi juga berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten karena terpilih bukan berdasarkan kapasitas, melainkan kemampuan finansial.

Politik tentunya tidak akan terlepas dari dampak yang di timbulkannya dalam lingkungan kehidupan pemuda dan Masyarakat, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara kepada para pemuda. Telah di temukan fakta-fakta menarik sehubungan dengan dampak yang di timbulkan oleh praktik politik tersebut. Mayoritas informan menyatakan bahwa politik adalah tindakan yang tidak bermoral. Mereka berpendapat bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan mengganggu proses demokrasi yang sehat. Politik dianggap memprioritaskan kepentingan pribadi dan kekuasaan, mengorbankan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan hak yang setara dalam proses politik.<sup>18</sup>Hanya 1 informan yang menyatakan bahwa politik bisa dianggap benar secara moral dalam kondisi tertentu yaitu selama masih ada tanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain. Pandangan ini menganggap bahwa politik hanya sebagai bagian dari strategi politik saja. Sebagian besar informan menekankan bahwa politik tidak dapat dibenarkan secara moral karena Yang menjadi alasan mengapa praktik politik disebut tidak bermoral, Sebagian besar informan menekankan bahwa politik tidak dapat dibenarkan secara moral karena hal tersebut Menghilangkan keadilan bagi kandidat yang berkompeten namun tidak memiliki sumber daya finansial besar sehingga dapat membuat kandidat tersebut kalah walaupun memiliki kompeten yang baik, mengarahkan pemilih pada keputusan yang tidak rasional yaitu memilih bukan berdasarkan kualitas calon, melainkan karena imbalan materi, dan yang terburuk ialah menormalisasi suap dan korupsi sejak awal karena calon yang terpilih dengan uang cenderung akan “balas modal” setelah menjabat juga meninggalkan kebiasaan buruk di kalangan pemuda dan Masyarakat yang menjadi terbiasa dan menormalisasikan praktik politik sebagai salah satu strategi dalam berpolitik. Responden menekankan bahwa membenarkan politik dari sisi moral dapat berakibat negatif jangka panjang, seperti menurunnya kualitas kepemimpinan, menumbuhkan budaya politik transaksional, dan menyuburkan praktik korupsi dalam pemerintahan. informan menilai politik sebagai tindakan yang tidak bermoral karena mencederai keadilan, integritas, dan kesetaraan dalam proses demokrasi. Meski ada satu pandangan yang melihatnya bisa dibenarkan dalam kondisi tertentu, suara mayoritas menolak keras praktik ini secara etis.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 19 informan, diperoleh beragam pandangan mengenai bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapi praktik politik yang dilakukan oleh calon pemimpin. Secara umum, temuan dari wawancara ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari dampak negatif dari politik dan memiliki gagasan-gagasan yang beragam mengenai cara menanggulangnya, baik dari sisi kebijakan maupun dari aspek kesadaran individu. Sebanyak 7 informan menyampaikan bahwa penyikapan terhadap politik harus dimulai dari penegakan hukum dan edukasi yang tegas oleh pemerintah. Mereka menilai bahwa praktik politik tidak akan hilang jika tidak ada keteladanan dan ketegasan dari lembaga pengawas seperti Bawaslu, serta aparat penegak hukum. Justru sering kali, menurut para informan, praktik ini dilakukan oleh elite politik dan bahkan difasilitasi oleh oknum pemerintah daerah. Oleh karena itu, edukasi politik kepada masyarakat juga menjadi sangat penting agar

<sup>18</sup> Wawancara pemimpin gereja: TW, JK, SR, DK, MT, YK. Bitung 4-5 Mei 2025.

<sup>19</sup> Wawancara pemimpin gereja: TW, JK, SR, DK, MT, YK. Bitung 4-5 Mei 2025.

masyarakat paham bahwa menerima uang dalam konteks pemilu adalah tindakan yang mencederai demokrasi dan bisa berdampak buruk pada kepemimpinan ke depan. 8 orang informan lainnya menekankan pentingnya pendidikan karakter sejak dini. Mereka berpendapat bahwa praktik politik dapat diberantas jika masyarakat tidak lagi memiliki mentalitas “miskin”, yakni kondisi ketika seseorang mudah tergoda oleh pemberian materi. Menurut mereka, pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan harga diri harus diberikan sejak usia muda agar masyarakat tumbuh menjadi pemilih yang bijak dan tidak mudah dimanfaatkan oleh calon yang tidak memiliki integritas. Selain itu, mereka menyoroti pentingnya sistem pemilu yang transparan dan adil, karena sistem yang tertutup dan penuh celah justru memicu maraknya transaksi politik. Ada pula 4 informan yang menekankan bahwa masyarakat sendiri memiliki peran penting dalam menyikapi politik. Masyarakat harus secara aktif menolak segala bentuk pemberian materi dari calon pemimpin dan berani memilih berdasarkan kualitas dan rekam jejak, bukan dari seberapa besar materi yang ditawarkan. Kesadaran ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral yang harus dimiliki oleh setiap warga negara dalam menjaga demokrasi yang sehat. Pemuda tidak hanya menyadari bahayanya politik, tetapi juga memiliki pemikiran yang kritis mengenai cara-cara efektif untuk menghadapinya. Upaya pemberantasan politik tidak bisa hanya mengandalkan satu sisi saja, tetapi harus bersifat menyeluruh: dari kebijakan, pendidikan, hingga kesadaran individu.<sup>20</sup>

Hasil Elaborasi Etika Politik Dengan Pandangana Gereja Mengani Politik.

Arifianto menekankan bahwa politik seharusnya dijalankan berdasarkan nilai-nilai agama seperti kasih, keadilan, dan kepedulian. Jika politik dipakai hanya untuk kepentingan pribadi, itu akan merugikan masyarakat. Sebaliknya, kalau nilai-nilai agama dijadikan dasar, maka kebijakan yang dibuat akan lebih berpihak pada rakyat. Gereja perlu menghidupkan kembali nilai-nilai Kristen dalam politik. Tujuannya agar politik dijalankan dengan cara yang benar dan sesuai kehendak Tuhan. Pemimpin gereja juga harus memberi contoh dan membina umat agar tahu bagaimana bersikap dalam dunia politik.

Peran Gereja Dalam Mereduksi Konflik Pemilu Di Era Digital Dampak negatif dari pengaruh media sosial salah satunya terkait dengan maraknya kemunculan ujaran kebencian di media sosial, yang mengakibatkan disintegrasi dan konflik horizontal sesama anak bangsa. Akibat dari perselisihan dan komentar yang merendahkan sesamanya dalam platform digital. Maka konflik dalam pemilu ini harus ditangani dengan baik supaya dapat membawa kepada politik yang sehat dan santun. Oleh karena itu setiap umat Tuhan harus memfilter informasi yang muncul di media sosial sehingga suasana menjadi lebih kondusif. Sebab adanya pergeseran struktur media ini membawa dampak terhadap kemunculan otoritas otoritas baru dengan kehadiran penggaung, yang sebelumnya hanya digunakan dalam ranah periklanan. Namun saat ini sebagai bagian dari agensi, otoritas baru ini membawa kepada kreativitas dalam mengkampanyekan gagasan agenda politik dan aktivitas destruktif yang dapat memecah sensitivitas solidaritas kebangsaan dan kenegaraan di level akar rumput demi meraup suara elektoral. Memang harus diakui bahwa masyarakat atau pemilih ini merupakan penentu politik itu sendiri dan sebagai fungsi kontrol politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melalui platform digital media sosial dinilai sangat efektif digunakan sebagai media komunikasi khususnya dalam memberikan informasi. Sehingga suara pemilih bisa digiring untuk tujuan politik. Media sosial juga dapat mendekatkan dan merapatkan hubungan antara komunikator politik dengan masyarakat. Peran gereja dalam mereduksi konflik pemilu di era digital memiliki dampak yang penting dalam mendorong perdamaian, pemahaman, dan kerukunan sosial selama proses pesta demokrasi. Juga gereja dapat mengupayakan dalam merepresentasikan pentingnya berpartisipasi dengan integritas dan menghindari praktik-praktik yang merusak, seperti penyebaran berita hoaks atau berita palsu, dan pernyataan retorika yang membakar konflik horizontal. Terlebih adanya perang media sosial dalam media sosial seperti penyebaran berita hoaks, yang sangat masif terjadi dewasa ini. Maka gereja harus menjadi pelopor politik santun yang menghargai kemanusiaan. Di mana gereja juga harus mendukung pemimpin yang

<sup>20</sup> Wawancara pemimpin gereja: TW, JK, SR, DK, MT, YK. Bitung 4-5 Mei 2025.

berkomitmen untuk mengabdikan kepada masyarakat dan memegang teguh prinsip-prinsip moral untuk menjalankan pemerintahan. Terlebih gereja yang memiliki jemaat untuk diberdayakan menjadi agen-agen perdamaian dan perubahan di seluruh lapisan masyarakat. Sebab melalui paradigma yang benar dan pendidikan Kristen serta pelatihan untuk mencapai sumber daya manusia yang bermartabat dan bermanfaat bagi sesama dan bangsa. Maka gereja dapat membantu anggotanya untuk berkontribusi positif dalam meredakan konflik dan mempresentasikan toleransi dalam masyarakat sosial dengan konten-konten kerukunan sosial yang mengedepankan kebersamaan dalam membangun bangsa. Oleh karena itu gereja, melalui umatnya, harus berperan aktif dalam ruang publik politis sebagai wujud memberitakan kedamaian dalam politik. Juga sejatinya gereja dapat terlibat dalam kegiatan kemanusiaan yang dapat membantu mengurangi ketegangan dan konflik sosial yang mungkin muncul selama pra pemilu. Ini termasuk program-program pemberian makanan, bantuan medis, dan dukungan sosial bagi mereka yang terlibat konflik-konflik kepentingan. Bahkan gereja dapat menyediakan ruang untuk dialog baik online maupun offline dari berbagai pihak yang menginginkan ruang diskusi sehat. Dengan demikian peran gereja dalam mereduksi konflik pemilu di era digital sangat penting dalam menjaga perdamaian demi perdamaian sosial dalam masyarakat luas dan tentunya gereja harus mendukung proses demokratis yang santun dan sehat, demi terciptanya masyarakat yang saling menghargai di ruang publik manapun.

Politik ternyata punya banyak dampak buruk, terutama bagi kalangan pemuda dan masyarakat. Dari hasil pengamatan dan wawancara, ditemukan beberapa fakta penting. Mayoritas pemuda yang diwawancarai menyebut bahwa politik adalah tindakan yang tidak bermoral. Mereka berpendapat bahwa praktik ini melanggar prinsip keadilan dan merusak demokrasi. Menurut mereka, politik hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kekuasaan, sambil mengorbankan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan kesetaraan dalam pemilu.<sup>21</sup>

Pandangan Dari Pemuda gmm menyatakan bahwa politik bisa saja dianggap tidak salah secara moral dalam kondisi tertentu, misalnya jika dilakukan dengan tanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Bagi dia, politik hanyalah salah satu bentuk strategi politik. Namun sebagian besar informan tetap menolak keras praktik ini, dengan alasan: Politik menghilangkan keadilan bagi calon yang sebenarnya berkualitas, tetapi tidak punya banyak uang. Pemilih bisa terdorong membuat pilihan bukan karena kualitas calon, tetapi karena mendapat imbalan materi. Praktik ini menormalisasi suap dan korupsi sejak awal, karena calon yang “membeli suara” biasanya akan berusaha mengembalikan modalnya setelah terpilih. Akhirnya, masyarakat, termasuk pemuda, menjadi terbiasa dengan politik, dan menganggapnya sebagai hal biasa. Mereka juga menyebut bahwa kalau politik dianggap wajar secara moral, dampaknya bisa sangat buruk dalam jangka panjang, seperti: Turunnya kualitas pemimpin, karena yang terpilih bukan orang terbaik, tapi yang punya uang. Tumbuhnya budaya politik yang bersifat transaksional. Korupsi akan makin merajalela di pemerintahan. Secara keseluruhan, para informan melihat politik sebagai tindakan yang tidak bermoral, karena melukai nilai-nilai penting dalam demokrasi. Meski ada satu pandangan berbeda, suara terbanyak tetap menolak politik secara etis dan moral.<sup>22</sup>

Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa ada beragam pandangan masyarakat tentang cara menghadapi praktik politik yang dilakukan oleh calon pemimpin. Umumnya, masyarakat sudah menyadari bahwa politik berdampak buruk dan mereka punya berbagai ide untuk mengatasinya, baik lewat kebijakan maupun lewat kesadaran pribadi. Penegakan Hukum dan Edukasi oleh Pemerintah Sebanyak 7 orang informan mengatakan bahwa langkah awal untuk mengatasi politik adalah penegakan hukum yang tegas dan edukasi politik dari pemerintah. Mereka percaya, selama tidak ada keteladanan dari lembaga pengawas seperti Bawaslu, atau aparat penegak hukum, politik akan terus ada. Bahkan, menurut mereka,

<sup>21</sup> Wawancara pemuda: MM, ST, EB, MK, SS, EA, DT, BH, NM, PT, JP, JM, TS, GT, DM, SM, PL, ES, MR. Bitung, 1-3 Mei 2025.

<sup>22</sup> Wawancara pemimpin gereja: TW, JK, SR, DK, MT, YK. Bitung 4-5 Mei 2025

praktik ini sering dilakukan oleh elite politik, dan terkadang difasilitasi oleh oknum pemerintah sendiri. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa menerima uang saat pemilu adalah tindakan yang merusak demokrasi, dan bisa berdampak negatif terhadap kualitas pemimpin di masa depan. Pendidikan Karakter Sejak Dini Ada 8 informan yang menekankan pentingnya pendidikan karakter sejak usia muda. Mereka menilai bahwa politik bisa dihapus kalau masyarakat tidak lagi memiliki mentalitas “miskin”, yaitu sikap yang mudah tergoda oleh uang atau hadiah. Solusinya adalah pendidikan yang menanamkan kejujuran, integritas, dan harga diri. Kalau sejak muda sudah terbiasa dengan nilai-nilai ini, maka saat dewasa, mereka akan menjadi pemilih yang cerdas dan tidak gampang dibeli. Mereka juga menyoroti perlunya sistem pemilu yang terbuka dan adil, karena sistem yang tertutup dan penuh celah justru membuka ruang bagi politik. Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat Sementara itu, 4 orang informan menekankan bahwa masyarakat sendiri punya peran penting. Masyarakat <sup>23</sup>harus berani menolak pemberian uang atau barang dari calon pemimpin, dan memilih berdasarkan kualitas serta rekam jejak calon, bukan karena imbalan materi. Sikap ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai warga negara untuk menjaga kualitas demokrasi.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Wawancara pemimpin gereja: TW, JK, SR, DK, MT, YK. Bitung 4-5 Mei 2025

<sup>24</sup> Wawancara pemimpin gereja: TW, JK, SR, DK, MT, YK. Bitung 4-5 Mei 2025

**KESIMPULAN**

Politik telah menjadi budaya yang mengakar, bahkan dianggap sebagai hal yang wajar dalam setiap momen pemilihan umum, termasuk di kalangan pemuda gereja. Banyak dari mereka menentukan pilihan berdasarkan imbalan materi ketimbang visi dan misi calon pemimpin. Kesadaran etis dan tanggung jawab moral pemuda masih rendah. Sebagian besar belum memahami makna hak pilih sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual dan sosial, sehingga mudah tergoda oleh janji-janji material. Dampak praktik politik sangat merusak, tidak hanya pada kualitas pemilu, tetapi juga pada persatuan jemaat dan integritas demokrasi. Hal ini turut memunculkan konflik internal, kecurigaan, bahkan perpecahan di antara sesama anggota jemaat.

**SARAN**

Bagi Pemuda GMIM, diharapkan mampu mengembangkan kesadaran iman yang kuat dan keberanian moral untuk menolak segala bentuk politik. Pemuda perlu dibina agar menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas serta tidak mudah tergoda oleh iming-iming materi saat menggunakan hak pilihnya. Bagi Gereja dan Majelis Jemaat, disarankan untuk: Membentuk forum diskusi dan pendidikan politik yang bernuansa etika Kristen bagi pemuda secara rutin. Memberikan keteladanan nyata dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat, terutama menjelang momentum politik. Dan Mengintegrasikan isu-isu etika politik dalam khotbah, pelayanan kategorial, dan pendidikan jemaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Asmoro. *Filsafat Umum*. Jakarta: rajawali pers, 2021.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Gunawan, Imam. *metode penelitian kualitatif, Teori dan Praktik*. Jakarta: umi Aksara, 2013.
- “<https://aclc.kpk.go.id/hajarseranganfajar>, Hajar Serangan Fajar, diakses tanggal 8 Desember,” 2014.
- Joswanto, Arifianto. “‘Memprioritaskan Nilai-Nilai Agama: Membangun Etika Politik dalam Aktualisasi Kebijakan Publik.’ LOGIA: Jurnal Teologi Pentakosta,” 2023.
- KPU. *Undang-Undang Pemilu*. Jakarta: KPU, 2017.
- Meutia Iryana, Rina. *Mengenal sistem Pemerintahan di Indonesia yuk*. Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2018.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Yudhistira, 1985.
- Niebuhr, H. Richard. *Christ and Culture*. New York: Harper & Row, 1951.
- Simamora, Adolf Bastian. “‘POLITIK MENURUT ALKITAB DAN IMPLIKASINYA BAGI PERAN GEREJA DALAM PUSARAN POLITIK DI INDONESIA,’ Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama,” 1, 1 (2019).
- Sinaga. “‘Umat Kristiani Dan Politik Praktis Di Indonesia: Dari Politik Minoritas Ke Politik Pluralisme.,’” 1, 1 (2019).
- Sumanto, Edi. “‘PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK (Studi Komperatif Al-Farabi Dengan Thomas Aquinas),’ EL-AFKAR Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis,” 2, 1 (2017).
- Udju Rohi, Yohanis. “‘Misi Gereja Melalui Dunia Politik,’ Missio Ecclesiae 6, no. 1,” 1, 6 (2017).
- Yonatan Alex, Arifianto. “‘Etika Kristen di tengah Dinamika Politik Praktis: Merevitalisasi Nilai-Nilai Agama dalam Praktik Politik Kontemporer.’ THRONOS: Jurnal Teologi Kristen,” 2023.
- Yonatan Alex, Arifianto. “‘Media Sosial dan Perdebatan Politik: Upaya Gereja Mereduksi Konflik Pemilu di Era Digital dalam Bingkai Etis Teologis.’ EULOGIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani,” 2023.
- H. Richard Niebuhr, *Christ and Culture* (New York: Harper & Row, 1951), 230.
- Imam Gunawan, *metode penelitian kualitatif, Teori dan Praktik* (Jakarta: umi Aksara, 2013), 89.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Yudhistira, 1985), 67.